

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI  
KELURAHAN REJOSARI KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA  
PEKANBARU**

**Oleh: Mega Octavia Vatmawati**

*Megaoctaviavatma.wati@gmail.com*

**Pembimbing : Febri Yuliani**

Program Studi Administrasi Publik - Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract***

*Poor people are citizens who are entitled to get welfare from the government. The provision of social assistance in the form of non-cash food assistance is one of the government's efforts to prosper the poor through the distribution of non-cash social assistance using the banking system, which is expected to support the recipient's productive behavior. But until now the implementation of the assistance still received complaints from the public who were not satisfied because there were still many poor people who had never received assistance and also the slow process of distributing aid. The purpose of this study was to see how the Implementation of the Non-Cash Food Assistance Program in Rejosari Sub-District, Tenayan Raya District, Pekanbaru City. This study used descriptive qualitative method. This study uses interviews, observation, and documentation using a purposive sampling method to source information and analyze data with triangulation techniques. The results showed that the Implementation of the Non-Cash Food Assistance Program in Rejosari Sub-District, Tenayan Raya District, Pekanbaru City was still not optimal, because it was not right on target beneficiaries in the implementation and not timely disbursement of funds, so the program objectives had not been achieved properly.*

***Keywords: Implementation, Food Aid, Public Policy***

## Latar Belakang

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di elektronik warung gotong royong (e-warong) yang bekerjasama dengan bank. Kota Pekanbaru terdiri dari 12 Kecamatan dan 83 Kelurahan. Kecamatan Tenayan Raya adalah salah satu kecamatan yang menerima bantuan pangan non tunai yang diberikan kepada penduduk miskin dalam hal untuk mensejahterakan masyarakat.

**Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Kota Pekanbaru Tahun 2017**

No	Kecamatan	Jumlah
1	Bukit Raya	12.741
2	Lima Puluh	7.649
3	Marpoyan Damai	22.709
4	Payung Sekaki	12.601
5	Pekanbaru Kota	5.897
6	Rumbai	20.053
7	Rumbai Pesisir	17.983
8	Sail	3.720
9	Senapelan	8.943
10	Sukajadi	9.025
11	Tampian	29.030
12	Tenayan Raya	32.177
<b>Jumlah</b>		<b>182.528</b>

*Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Tahun 2018*

Dari tabel 1.1 dapat diketahui bahwa untuk wilayah Kota Pekanbaru, data basis terpadu menunjukkan wilayah Kecamatan Tenayan Raya merupakan data terbanyak penduduk miskin yakni 32.177 jiwa. Kecamatan Tampian sebanyak 29.030 jiwa, Marpoyan Damai 22.709 jiwa, Rumbai 20.053 jiwa, Rumbai Pesisir

17.983 jiwa, Bukit Raya 12.741 jiwa, Payung Sekaki 12.601 jiwa, Sukajadi 9.025 jiwa, Senapelan 8.943 jiwa, Lima Puluh 7.649 jiwa, Pekanbaru Kota 5.897 jiwa, dan yang terakhir Kecamatan Sail 3.720 jiwa data kemiskinan.

Data ini yang akan diverifikasi dan validasi oleh pihak RW di kecamatan masing-masing untuk melihat apakah data tersebut sesuai untuk menerima program-program bantuan sosial pemerintah. Jika ada keluarga atau jiwa yang tidak termasuk dalam data bisa didaftarkan sebagai penerima bantuan juga dan data yang ada jika sudah tidak sesuai dapat dikeluarkan dari data kemiskinan.

Pada tahun 2017, Pemerintah melaksanakan uji coba transformasi subsidi Rastra (Beras Sejahtera) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui sistem perbankan untuk mendukung Strategi Nasional Keuangan Inklusif dan untuk mewujudkan bantuan sosial tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat administrasi, dan tepat kualitas. Besaran BPNT adalah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per bulan untuk setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai.

Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai adalah Keluarga, yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai. Pada tahun 2017, KPM adalah penduduk dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan. Sumber data KPM Bantuan Pangan Non Tunai adalah Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, selanjutnya disebut DT-PFM, yang merupakan hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu di tahun 2015.

**Tabel 1.2 Jumlah KPM Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kota Pekanbaru Tahun 2017**

No	Kecamatan	Jumlah
1	Bukit Raya	1.352
2	Lima Puluh	804
3	Marpoyan Damai	2.299
4	Payung Sekaki	1.496
5	Pekanbaru Kota	752
6	Rumbai	2.626
7	Rumbai Pesisir	2.133
8	Sail	423
9	Senapelan	1.146
10	Sukajadi	1.050
11	Tampan	2.486
12	Tenayan Raya	3.900
<b>Jumlah</b>		<b>20.467</b>

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Tahun 2018

Dari tabel 1.2 dapat diketahui bahwa penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) paling banyak di Kecamatan Tenayan Raya dan paling sedikit di Kecamatan Sail. Dari setiap kecamatan program tersebut belum maksimal, namun masih tetap ada usaha dari para tim koordinasi Bantuan Pangan Non Tunai. Sejak program ini digulirkan, warga miskin penerima bantuan tidak lagi membawa uang tunai seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan tabel 1.2 KPM terbanyak yaitu teletak di Kecamatan Tenayan Raya, dipilihnya daerah ini sebagai lokasi penelitian dikarenakan Kecamatan Tenayan Raya merupakan penerima BPNT terbanyak dan lebih fokus lagi di Kelurahan Rejosari yang berdasarkan data adalah kelurahan terpadat pada Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

**Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Tenayan Raya Tahun 2017**

No	Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kulim	1.073	968	2.041
2	Tangkerang Timur	10.174	9.864	20.038
3	Rejosari	11.463	11.090	22.553
4	Bencah Lesung	11.476	10.846	22.322
5	Sialang Rampai	2.921	1.851	4.772
6	Pebatuan	5.386	5.086	10.472
7	Mentangor	7.570	7.201	14.771
8	Pematang Kapau	7.952	7.465	15.417
9	Sialang Sakti	11.192	10.433	21.625
10	Tuah Negeri	3.267	3.073	6.340
11	Melebung	479	366	845
12	Industri Tenayan	1.285	1.268	2.553
13	Bambu Kuning	10.146	9.715	19.861
<b>Jumlah</b>		<b>84.384</b>	<b>79.226</b>	<b>163.610</b>

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2020

### Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai

(BPNT) di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru?”

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah “Untuk mengetahui Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.”

### **Manfaat Penelitian**

- a. Secara teoritis
  1. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Administrasi pada umumnya dan khususnya pada Administrasi Publik.
  2. Memberikan wawasan dan pengetahuan tentang Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
- b. Secara praktis
  1. Memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, dan juga Pemerintah Daerah Kecamatan Tenayan Raya dalam proses sosialisasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) secara khususnya di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya.
  2. Sebagai referensi dan pengembangan untuk mendapatkan data dan informasi dalam melakukan penelitian lanjutan.

## **Konsep Teori**

### **1. Kebijakan Publik**

Menurut Adiwisastra dalam Tachjan (2006:11) keberhasilan implementasi kebijakan publik memerlukan pendekatan *top-down* dan *bottom-up* sekaligus. Pendekatan *top-down* terutama berfokus pada ketersediaan unit pelaksana (birokrasi), standar pelaksanaan, kewenangan, koordinasi, dan lain-lain. Pendekatan *bottom-up* menekankan pada strategi-strategi yang digunakan oleh pelaksana saat menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh suatu kebijakan publik sebagai dasar untuk memahami kebijakan publik itu secara keseluruhan.

### **2. Implementasi Kebijakan**

Menurut Syukur dalam Sumaryadi (2005:79) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu : Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan, Adanya target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan, dan adanya unsur pelaksana atau implementor baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

### **3. Program**

Menurut Abadi dalam Jones (2012:19) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, pemberian tugas, langkah-langkah yang diambil, sumber-sumber yang dimanfaatkan dan elemen-elemen yang diperlukan untuk melaksanakan arah dan tindakan tertentu. Program ini biasanya dijabarkan dan dirincikan dalam sebuah proyek-proyek yang didukung oleh anggaran namun sebaik apapun program

tanpa adanya implementasi tidak akan mungkin sasaran atau tujuan yang dikehendaki akan tercapai.

## **Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, menurut (Creswell, 2016), penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang-oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif melihat upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data. Penelitian yang bermaksud untuk melakukan pengukuran yang cermat terhadap fenomena-fenomena sosial dengan cara memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan-kenyataan atau fakta dilapangan mengenai Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Adapun pertimbangan pemilihan lokasi penelitian ini karena peneliti ingin mengetahui lebih jauh lagi tentang Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Kemudian merupakan lokasi terbanyak yang mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai

berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

### **3. Informan Penelitian**

Informan adalah subjek yang memberikan data berupa informasi kepada peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2014:85), teknik *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Penulis memilih informan yang penulis anggap mengetahui tentang permasalahan penelitian. Adapun yang menjadi informan yang akan memberikan keterangan demi mendapatkan data yang utuh dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin Dinas Sosial Kota Pekanbaru;
2. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
3. Pengelola E-Warong “Marwah Hangtuh” di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
4. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
5. Masyarakat penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru yang dipilih berdasarkan data hasil verifikasi dan validasi BPNT Kota Pekanbaru Tahun 2017.

### **4. Sumber Data**

#### **a. Data primer**

Data primer yang berkaitan disini diperoleh penulis langsung dari sumbernya yang berupa informasi dari informan yang diwawancarai dan hasil observasi di lapangan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara

adalah masih tidak tepat sasaran pada keluarga penerima manfaat dan penyaluran dana BPNT setiap bulan tidak tepat waktu maka dari itu banyak masyarakat yang datang ke E-Warong untuk menanyakan hal tersebut. Serta masih banyaknya kartu yang bermasalah sampai sekarang, nama penerima keluar, namun saldo tidak ada masuk kedalam kartu.

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder yang diperoleh antara lain:

1. Profil Dinas Sosial Kota Pekanbaru;
2. Profil Kelurahan Rejosari;
3. Tugas, peran dan fungsi masing-masing pemangku kepentingan dalam Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
4. Peraturan Daerah atau dasar hukum Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
5. Data Kecamatan yang menjalankan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Pekanbaru;
6. Data jumlah masyarakat penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi dilaksanakan dalam periode november 2018 hingga februari 2019 untuk memperoleh gambaran tentang obyek penelitian, seperti proses pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Rejosari Kecamatan

Tenayan Raya Kota Pekanbaru dan lain-lain.

b. Wawancara

Wawancara peneliti lakukan dengan secara mendalam terhadap informan yang peneliti anggap mengetahui tentang Implementasi Program Bantuan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Wawancara dilakukan agar peneliti mengetahui bagaimana tanggapan informan tentang Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini.

c. Dokumentasi

Penelitian ini dibantu oleh alat bantu dokumentasi yaitu menggunakan kamera foto, dan alat perekam suara (*recorder*). Kamera foto digunakan untuk merekam kegiatan penelitian di Kantor Lurah Rejosari dan kejadian-kejadian yang penulis temukan di lapangan. Sedangkan perekam suara digunakan untuk merekam percakapan wawancara dengan subjek penelitian. Dokumentasi disini seperti dokumen peraturan daerah, foto yang berkaitan dengan kegiatan, serta dokumen wawancara.

## 6. Analisa Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data yang bersifat interaktif (Creswell, 2016), dengan langkah-langkah analisis data kualitatif sebagai berikut :

- a. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, *men-scanning* materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

- b. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun *general sense* atau informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Gagasan umum apa yang terkandung dalam perkataan partisipan? Bagaimana nada gagasan-gagasan tersebut? Bagaimana kesan dari kedalaman, kredibilitas, dan penuturan informasi itu?
- c. Menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data. *Coding* merupakan proses mengolah materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah melibatkan beberapa tahap: mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensegmentasikan kalimat-kalimat atau gambar-gambar tersebut ke dalam kategori-kategori, kemudian melabeli kategori-kategori ini dengan istilah-istilah khusus, yang sering kali didasarkan pada istilah/bahasa yang benar-benar berasal dari partisipan.
- d. Tahapan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting*, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam situasi tertentu.
- e. Menghubungkan tema-tema atau deskripsi-deskripsi dalam suatu rangkaian cerita, dalam menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema tersebut akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif.
- f. Menginterpretasi atau memaknai data. Interpretasi bisa berupa makna yang berasal dari perbandingan

antara hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari literature atau teori.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Pada penelitian ini peneliti akan menjelaskan pengimplementasian program bantuan pangan non tunai (BPNT) yang ada di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru menggunakan pendapat Syukur dalam Sumaryadi (2005:79), yang indikatornya sebagai berikut :

1. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan

Dalam kebijakan publik ada sebuah kebijakan atau program yang harus dilaksanakan dalam mensejahterakan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.” Adapun salah satu program yang dilaksanakan oleh pemerintah yaitu Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Program bantuan pangan non tunai dimulai sejak tahun 2017, dan program BPNT merupakan skema baru subsidi beras. Jika sebelumnya beras disalurkan langsung ke seluruh warga miskin menggunakan uang tebus, kini warga miskin yang sudah didata masuk ke dalam Program Keluarga Harapan (PKH) atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan kartu elektronik “Kombo” untuk membelanjakan beras dengan harga yang murah. Dulu subsidi maka penerima rastra masih harus bayar tebusan per kg Rp 1.600. Beras 15 kg bayar Rp 24.000. Sekarang sudah tidak ada lagi subsidi, yang ada adalah bansos. Jadi mereka terima rastra, tidak ada harga tebusnya. Perbedaan dulu dan sekarang terletak pada cara menebus barangnya.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu ukuran dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal ketika para pelaksananya menyadari terhadap ukuran dan tujuan kebijakan. Begitu halnya dengan implementasi bantuan pangan non tunai oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk masyarakat miskin yang juga mempunyai ukuran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pada implementasinya pemberian bantuan pangan non tunai oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dibantu oleh tenaga pendamping BPNT atau disebut dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang bertugas mencakup koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan BPNT, serta memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program.

Sejauh ini, program bantuan pangan non tunai ini penerapannya sudah maksimal tetapi masih sering terjadi kesalahan dalam implementasi kebijakan atau program salah satunya disebabkan

oleh karena belum tepat waktunya penyaluran dari kebijakan atau program yang dilaksanakan.

## 2. Target group atau kelompok sasaran

Target group merupakan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari kebijakan yang telah ditetapkan. Pada penelitian ini target group atau kelompok sasaran dari implementasi bantuan pangan non tunai adalah penduduk dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan. Sumber data KPM bantuan pangan non tunai adalah Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PFM). Namun pada kenyataannya, pada kelompok sasarannya belum tepat dikarenakan masih adanya kesalahan data penerima bantuan ini sudah termasuk kategori mampu namun masih mendapatkan bantuan

Mengenai target group atau kelompok sasaran dalam Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru masih terdapat nama-nama masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan dikarenakan susahny sekarang mengusulkan nama-nama baru masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan.

Kepuasan target group atau kelompok sasaran sangatlah penting untuk mengetahui keberhasilan dari suatu kebijakan. Pada penelitian ini kepuasan dan kesejahteraan dari masyarakat kurang mampu yang menjadi tolak ukur suatu keberhasilan implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

## 3. Unsur pelaksana / implementor

Unsur pelaksana yang dimaksud ialah orang yang melaksanakan atau yang mengimplementasikan suatu kebijakan atau program biasa disebut implementor. Implementor bisa terdapat pada organisasi ataupun perseorangan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi suatu program.

Dalam proses implementasi kebijakan, Dinas Sosial sebagai salah satu implementor dalam program bantuan ini. Banyak pihak yang terkait dalam pelaksanaan bantuan pangan non tunai. Namun, pihak yang selalu memantau seluruh kegiatan dilapangan adalah tenaga pendamping BPNT yang disebut dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Implementor yang terlibat harus mengerti dan memahami definisi program, tujuan program, dan lain sebagainya. TKSK berfungsi sebagai penghubung antara penerima bantuan di tiap kelurahan dan kecamatan dengan pihak pemerintah daerah khususnya Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, disimpulkan bahwa :

Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru pada kenyataannya yang terjadi di lapangan belum berjalan dengan maksimal, baik dalam nama keluarga penerima manfaat program maupun penyaluran saldo ke rekening para penerima bantuan pangan non tunai ini masih terdapat banyak kendala seperti masih ada ketidaktepatannya sasaran

dalam penerimaan BPNT ini serta dalam penyaluran saldo BPNT setiap bulannya juga belum tepat waktu sehingga dapat dilihat bahwa Implementasi Program BPNT di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru belum berjalan sebagaimana mestinya.

## **SARAN**

Dari kesimpulan yang diperoleh, maka saran dalam penelitian ini sebagai berikut :

Perlu adanya verifikasi dan validasi data baru yang dilakukan oleh pemerintah untuk menetapkan masyarakat miskin yang benar-benar sesuai dengan penetapan kriteria dan pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu agar mewujudkan bantuan sosial tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat administrasi, dan tepat kualitas sesuai dengan tujuan program yang telah ditetapkan. Kemudian Pemerintah daerah harus dapat lebih meningkatkan konsistensi dalam penggunaan data penerima bantuan pangan non tunai ini, jika data tersebut sudah diverifikasi diharapkan untuk melaporkan pada pihak pengelola program agar tidak adanya lagi pendapat yang berbeda antara pengelola program satu dengan yang lainnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Creswell, John W. 2016. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ekowati, Mts Roro Lilik. 2005. *Perencanaan Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program (Suatu Kajian Teoritis dan*

- Praktis*). Surakarta: Pustaka Cakra.
- Jones, Charles O. 2012. *Pengantar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Keban, Yeremias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Koryati, Nyimas Dwi Dkk. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta: YPAPI.
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (Konsep dan Aplikasi Proses kebijakan Publik dan Pelayanan*. Bandung: Alfabeta.
- Nugroho, D. Riant. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Public Policy*. Edisi Kelima *Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Solichin, Ismail. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik "Konsep dan Aplikasinya"*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) & Lemlit UNPAD.
- Umar, Husein. 2005. *Evaluasi Kinerja Perusahaan (Teknik Evaluasi Bisnis dan Kinerja Perusahaan Secara Komprehensif), Kuantitatif, dan Modern*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS.

**Dokumen :**

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.
- Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah.

- Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
- Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
- Petunjuk Teknis Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Tahun 2018.

**Sumber Lain :**

Rasid, Abdul. 2012-2014. *Implementasi Kebijakan Program Beras Miskin (Raskin) Di Kelurahan Moro Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Tahun 2012-2014*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Tanjung Pinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji.